

**PERAN BUMDES DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS BUMDES PANGGUNG HARJO,
BANTUL DAN BUMDES TRIDADI, SLEMAN)**

SL Harjanta

Universitas Widya Mataram

Email: harjantosulis@gmail.com

Abstract

The problem of poverty is still a serious problem that must be addressed by cities and regencies in the Special Region of Yogyakarta (DIY). Based on the results of a survey from the Central Statistics Agency (BPS) as of March 2019, the number of poor people was 446,000 people or about 11.7 percent of the population of DIY. Studies on BUMDes have indeed been carried out by many previous researchers. The novelty in this research is to compare the roles of two BUMDes in an effort to reduce poverty. The two BUMDes are Panggung Lestari, Sewon, Bantul and Tridadi Makmur, Sleman. The results of this research conclude that both BUMDes contribute to efforts to reduce poverty levels. The pattern carried out is firstly by opening up employment opportunities, making residents as business partners, providing educational scholarships and also repairing uninhabitable houses.

Keyword: Policy; Poverty Alleviation; BUMDES.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasar hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019, jumlah warga miskin sebanyak 446.000 jiwa atau sekitar 11,7 persen dari penduduk DIY. Angka ini mengalami penurunan dibanding dengan jumlah warga miskin pada September 2018 lalu sebesar 450.250 orang. Masih menurut BPS, penduduk miskin di DIY, paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY tercatat sebanyak 304.660 orang atau lebih dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan yang banyaknya 143.810 orang.

Meskipun demikian, secara persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan yang mencapai 13,89 persen. Penduduk miskin di perkotaan adalah sebanyak 10,89 persen. Selama periode Maret 2018-Maret 2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan menunjukkan fluktuasi. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin perkotaan tercatat sebanyak 305.240 orang. Selanjutnya, pada September 2018 turun sebesar 2,22 persen atau menjadi 298.470 orang. Namun, pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 304.660 atau terjadi kenaikan sebesar 6,2 persen. BPS juga mencatat garis kemiskinan DIY pada awal Maret 2019 sebesar Rp 423.026 per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut meningkat 4,13 persen dari kondisi September 2018 yang besarnya Rp 414.899 per kapita per bulan.

Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat dijadikan objek pelaksanaan pembangunan. Karena wilayah desa mampu berkenaan secara langsung dengan masyarakat. Dengan adanya pembangunan di desa, akan tercipta kesejahteraan dan berujung pada pengurangan kemiskinan. Mengingat sebagian penduduk miskin Indonesia berada di wilayah desa dan desa merupakan objek pembangunan utama, maka upaya pemberantasan kemiskinan akan efektif jika dimulai dari wilayah desa. Berbagai potensi desa dapat diandalkan dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Aset terbesar yang dimiliki desa ialah lekatnya nilai gotong royong dan nilai-nilai lokal lainnya. Selain itu, kondisi modal sosial (*social capital*) masyarakat desa yang sudah sangat kuat merupakan hal yang sangat memungkinkan untuk mendorong kemandirian masyarakat di wilayahnya.

Kemandirian masyarakat desa akan tercapai ketika pendapatannya meningkat. Menurut Gunawan, Badan Umum Milik Desa (BUMDes) merupakan wadah yang mampu menampung

kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa, baik kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah. Regulasi BUMDes diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat 1. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. BUMDes dibentuk dengan misi menggerakkan roda ekonomi melalui optimalisasi potensi yang ada di desa tersebut.

Sementara itu, data pada tahun 2017 menunjukkan jumlah BUMDes yang ada di DIY sebanyak 140 Desa. Dengan begitu hampir dari setengah desa di DIY yang berjumlah 392 desa telah memiliki BUMDes. Hal ini menjadi potensi, di mana BUMDes berperan untuk mengurangi angka kemiskinan di DIY.

Teori Kemiskinan

Menurut Friedman (2007), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Yang dimaksud kekuasaan sosial adalah pertama, modal produksi atas aset, misal tanah perumahan, peralatan dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Sementara itu, menurut Djohadikusumo (1994) kemiskinan muncul sebagai akibat kesenjangan yang mengandung dimensi ekonomis sosiologis dan berdimensi ekonomi regional. Kemiskinan ini terjadi sebagai akibat adanya ketimpangan kekuatan yang sangat mencolok di antara golongan-golongan pelaku ekonomi, di mana pengusaha besar cenderung mengandalkan kekuatan sumberdayanya untuk merebut suatu kedudukan di pasar barang dan jasa. Selain dari dimensi ekonomi dan nonekonomi, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh dimensi geografis, sebuah rumah tangga miskin di wilayah yang mendukung dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan, sementara rumah tangga miskin yang berada pada wilayah yang tidak mendukung, cenderung menjadi stagnan dan bahkan menjadi sangat miskin.

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam, yaitu: konsumsi beras, tingkat pendapatan, pengeluaran rumah tangga, kebutuhan fisik minimum, kebutuhan dasar dan kriteria dari BPS. Menurut BPS, kriteria dalam menentukan keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin apabila:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- 12) Sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00 seperti sepeda motor (nonkredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Sementara itu, menurut BPS, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS ialah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2.100 kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya.

Faktor penyebab kemiskinan memang sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Artinya, kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Berdasarkan penelitian Nurwati, secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan

adalah pendidikan, pendapatan, lokasi serta keterbatasan akses, baik itu akses ke kesehatan, keuangan maupun pelayanan publik lainnya.

Menurut Thorbecke sebagaimana dikutip oleh Widiastuti, kemiskinan dapat lebih cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Hal tersebut dikarenakan; pertama, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan; kedua, penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri.

Berbicara kemiskinan tentunya tidak asing dengan teori “Vicious Circle of Poverty” atau yang disebut dengan teori “Lingkaran Setan Kemiskinan” yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Teori tersebut menggambarkan suatu konstelasi melingkar dari daya-daya yang cenderung beraksi satu sama lain sehingga menempatkan suatu negara miskin terus-menerus dalam suasana kemiskinan. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa negara sedang berkembang biasanya memiliki produktivitas yang rendah sehingga penghasilan seseorang juga rendah dan hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung. Padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat sehingga kapitalnya tidak efisien atau boros.

Meier dan Baldwin mengemukakan pula satu lingkaran perangkap kemiskinan yang timbul dari hubungan saling mempengaruhi di antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang masih belum dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, dalam suatu masyarakat harus memiliki tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES, pengertian BUMDes ialah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk. Menurut Rahardjo dan Ludigdo (2006), sebagaimana dikutip oleh Ramadana, dalam hal perencanaan dan pembentukannya BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kesepakatan masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi maupun konsumsi harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Menurut Maryunani (2008) sebagaimana dikutip oleh Samadi et al., ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah:

- a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- b. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- c. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat;
- e. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa;
- f. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal;
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*);
- i. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

- j. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti, misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini mengambil lokasi di dua BUMDes yakni, BUMDes Panggungharjo, Sewon, Bantul dan BUMDes Tridadi, Sleman. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2010:156). Dalam penelitian ini, ada beberapa pihak yang akan menjadi informan kunci, antara lain:

1. Ketua BUMDes Tridadi, Sleman
2. Kepala Desa Tridadi, Sleman
3. Direktur BUMDes Panggungharjo, Sewon, Bantul
4. Kepala Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul

Dalam penelitian ini, data yang berhasil dihimpun baik data yang bersifat numerik atau kuantitatif maupun kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Data akan diolah dengan analisa yang bersifat induktif dengan pendeskripsian. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Sugiyono (2011:13), bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif (Mills dan Huberman, 1992:20). Analisa interaktif dilakukan dalam empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan berbagai macam cara, antara lain wawancara, angket, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahapan analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan. Disajikan dalam pengajuan data dengan cara keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan.

Hasil Penelitian

Studi tentang BUMDes memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Hasil riset sebelumnya banyak membahas terkait kinerja, manajemen hingga peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam riset ini, secara khusus mengkaji peran BUMDes dalam mengatasi kemiskinan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam, maka penelitian ini mengkomparasikan dua BUMDes, yakni Panggungharjo dan Tridadi Makmur dalam peran mereka menanggulangi kemiskinan.

Profil dan Sejarah Pendirian BUMDes

BUMDes Panggungharjo, Pioner Sekaligus Berprestasi

Desa Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk pioner dalam pembentukan BUMDes di tingkat nasional. Sebelum desa-desa lain membentuk,

Panggungharjo telah mendirikan BUMDes. Tak hanya sebagai *pioneer*, kinerja BUMDes Panggungharjo juga menjadi kiblat BUMDes lainnya.

Sejak berdiri hingga kini, BUMDes Panggungharjo atau Panggung Lestari terus mengukir prestasi. Tahun 2014 menjadi BUMDes terbaik sehingga menjadi rujukan pemerintah desa lainnya dalam pengembangan BUMDes. Penghargaan yang diraih oleh BUMDes Panggungharjo antara lain Desa Terbaik Tingkat Nasional (2014), Indonesia Property & Bank Award XII (2017), *Asean Leadership Award On Rural Development and Poverty Eradication* di Myanmar (2019), dan lain-lain. Hingga saat ini, kunjungan dari beberapa desa di seluruh Indonesia hampir mencapai 1.200 kunjungan.

BUMDes Panggung Lestari sendiri secara resmi berdiri pada bulan 25 Maret 2013. BUMDes Panggung Lestari mempunyai ijin usaha IUMK dengan Nomor 111/SWN/IUMK/V/2016. Dasar pendirian BUMDes Panggung Lestari adalah Perdes No. 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian BUMDes Panggung Lestari mempunyai tujuan jangka panjang yakni untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Tujuan jangka pendek yang hendak dicapai atas pendirian BUMDes Panggung Lestari adalah:

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan.
- 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.
- 4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa

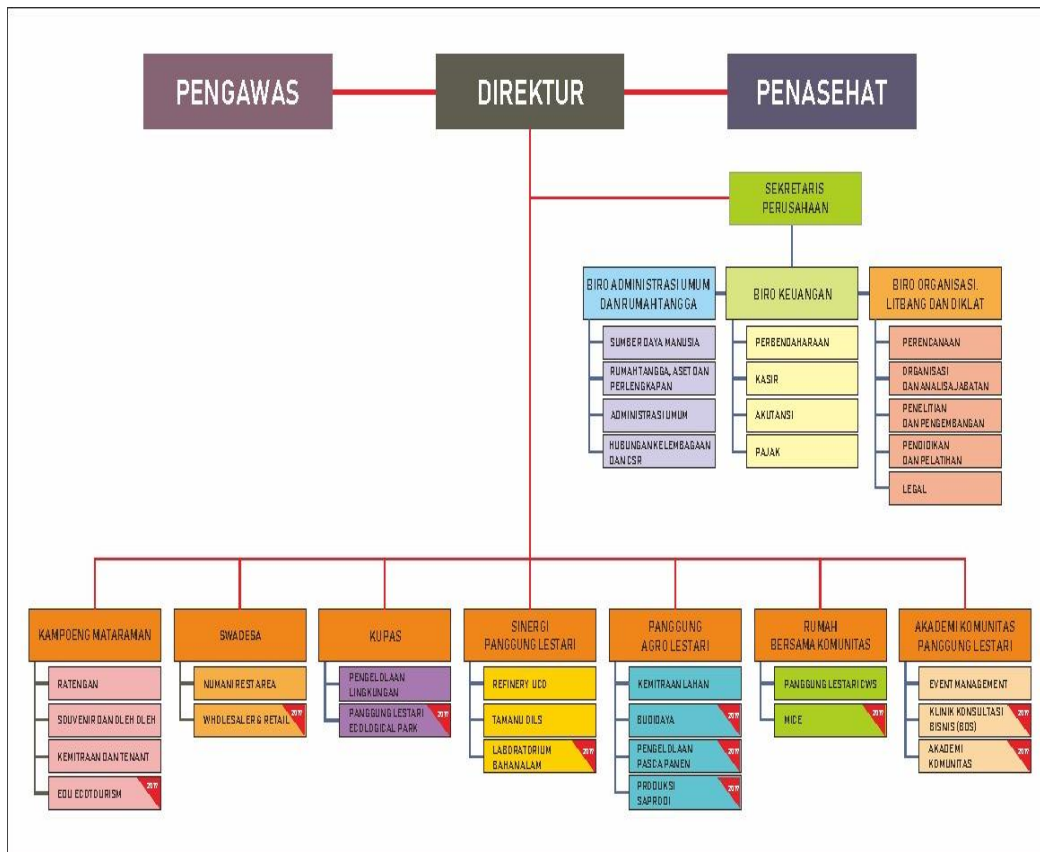
yang berpenghasilan rendah.

5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja.

6) Meningkatkan pendapatan asli desa.

Dalam Pengelolaan, BUMDes Panggung Lestari juga mempunyai organisasi seperti pada umumnya. BUMDes Panggung Lestari dipimpin langsung oleh seorang Direktur yang membawahi sekretaris dan sejumlah biro, selain itu juga membawahi beberapa manajer di setiap unit usaha. Berikut organisasi BUMDes Panggung Lestari:

Gambar 1.
Struktur Organisasi BUMDes Panggung Lestari



Pembentukan BUMDes ini dimulai dari masalah penanganan sampah di lingkungan desa yang sempat memunculkan konflik antar warga. Untuk menangani konflik tersebut, Pemerintah Desa Panggungharjo membentuk Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) pada akhir tahun 2012 yang dimulai di Pedukuhan Sawit dan Dongkelan. Saat itu program tersebut mendapat dukungan dana dari program pemberdayaan Pemerintah DIY. Pendirian KUPAS pada tingkat pedukuhan tersebut menjadi embrio pendirian BUMDes Panggung Lestari.

Dalam pendirian BUMDes Panggung Lestari, pemerintah desa memberikan daya

dukung atas pelaksanaan program tersebut, dengan mengalokasikan setoran modal sejumlah Rp. 37.000.000,00. Modal tersebut terdiri dari dana cadangan yang ditujukan untuk pendirian BUMDes sebesar Rp. 12.000.000,00 ditambah dengan Rp. 25.000.000,00 sebagai modal penyertaan. Modal tersebut untuk membentuk KUPAS pada tingkat desa dan digunakan untuk operasional awal dan pengadaan fasilitas pendukung seperti renovasi TPS Pasar Niten, kendaraan pemungut sampah dan lain sebagainya

Selanjutnya, Pemerintah Desa mengukuhkan keberadaan KUPAS dengan mendirikan BUMDes melalui Perdes No. 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari. Dengan demikian, KUPAS didesain menjadi salah satu unit bisnis BUMDes Panggung Lestari yang bergerak pada bidang jasa pengelolaan lingkungan .

Pengembangan unit usaha baru di BUMDes juga memunculkan unit usaha baru antara lain R-UCO (Refined-Used Coconut Oil), Kampoeng Mataraman, Swadesa dan Tamanu Oils. Dari berbagai macam unit usaha, Kampoeng Mataraman juga memberikan warna tersendiri dalam unit usaha, karena unit usaha ini menjadi pemasukan pendapatan yang besar bagi BUMDes Panggung Lestari dan Pemerintah Desa.

BUMDes Tridadi Doangkrak PADes

Sementara itu, meski usia pendiriannya relatif muda, BUMDes Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terbilang memiliki kinerja yang baik, dibanding BUMDes yang lain. Mengacu pada hasil riset Muflih Muhammad Mahir (2020), pada tahun 2018, BUMDes Tridadi Makmur berhasil membukukan keuntungan kurang lebih sebesar Rp300.000.000. Dari angka itu, 51% atau sebesar Rp. 157.744.364 menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa, sedangkan total Pendapatan Asli Desa (PADes) di tahun 2018 sebesar Rp. 264.063.750. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes berkontribusi ke desa lebih dari 50% dari total PADes.

BUMDes ini didirikan pada tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Rapat Musyawarah Desa dengan nomor keputusan 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Desa Tridadi, 2018). Saat ini BUMDes Tridadi Makmur sudah memiliki struktur kepengurusan mulai dari penasehat, pengawas, hingga kepala unit di masing-masing unit usaha.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pendirian BUMDes Tridadi, yaitu:

- a). Membuka lapangan kerja
- b). Meningkatkan perekonomian desa

- c). Ikut andil mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan
- d). Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa
- e). Optimalisasi pemanfaatan aset desa untuk kesejahteraan desa
- f). Mengembangkan kerjasama usaha antar desa
- g). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- h). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa.

BUMDes Tridadi Makmur saat ini memiliki dua unit usaha, yaitu:

- a. Unit Usaha Rental dan Budidaya Tanaman Hias.

Unit usaha ini berdiri pada akhir Desember 2017 dengan alamat di Jl. Purbaya 24, Tridadi, Sleman. Secara garis besar, unit usaha Tanaman Hias terfokus pada 3 hal, yaitu: budidaya tanaman, rental/sewa tanaman hias, dan perawatan tanaman. Adapun fokus usaha pada 3 tahun awal ini adalah produksi tanaman.

- b. Unit Usaha Puri Mataram Resto dan Wahana Wisata Puri Mataram.

Unit usaha ini adalah destinasi wisata baru yang bergerak di bidang resto dan wahana wisata. Puri Mataram beralamat di Jl. PJK, Drono Tridadi, Sleman, Yogyakarta.

Peran dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Menilik dari tujuan pendirian kedua BUMDes di atas, memang secara jelas menyebutkan tentang penciptaan lapangan kerja baru hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut Direktur BUMDes Panggung Lestari, Eko Pambudi, BUMDes yang dia kelola terbukti mengurangi angka pengangguran di wilayah Desa Panggung Harjo dan sekitarnya. Saat ini, total jumlah karyawan yang bekerja di unit usaha di bawah BUMDes Panggung Lestari sebanyak 90 orang. Bahkan secara khusus, unit usaha Kampung Mataraman mempekerjakan karyawan yang sudah berusia lanjut. Di lihat dari usia, mereka yang bekerja di Kampung Mataraman, akan sudah mendapat pekerjaan di tempat lain, karena terbentur usia. Sementara itu, di unit usaha pengelolaan sampah, banyak karyawan maupun mitra yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Di unit usaha Kampung Mataraman ini juga diberikan

kesempatan bagi warga sekitar untuk jadi mitra, yakni dengan bentuk warga sekitar bisa menjual produk maupun memasok kebutuhan yang diperlukan di Kampung Mataraman.

Selain itu, unit usaha KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah) mempunyai program yang menarik yaitu memilah sampah menabung emas, di mana warga desa melakukan pemilahan sampah, selain sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, warga desa juga mendapatkan manfaat berupa tabungan emas dari hasil pemilahan sampah. Sampah anorganik bernilai jual dibawa ke bank sampah terdekat kemudian akan ditabungkan dalam bentuk emas bekerjasama dengan PT. Pegadaian. Tabungan sampah ini diharapkan dapat menjadi jaminan hari tua bagi warga desa. Tabungan dapat dijadikan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

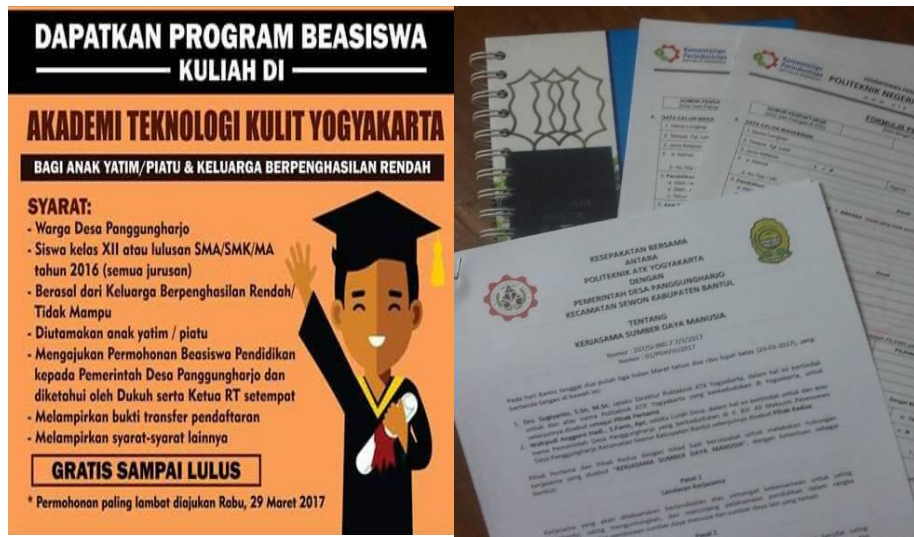
”Jika ada warga miskin atau korban PHK yang membutuhkan pekerjaan, mereka dapat menghubungi ketua RT setempat dan kemudian disampaikan kepada Dukuh. Kemudian Kepala Pedukuhan menghubungi BUMDes untuk mengusahakan memberi pekerjaan kepada warga desa miskin tersebut. Informasi mengenai lowongan pekerjaan memang lebih sering disebarluaskan melalui Ketua RT, PKK, Karang Taruna dan lembaga desa lain baik melalui media sosial maupun lisan. Dengan cara ini, diharapkan informasi mengenai lowongan pekerjaan dapat tersampaikan kepada warga yang memang membutuhkan pekerjaan.” (Wawancara, 15 April 2020).

Sementara itu, Lurah Desa Panggung Harjo, Wahyudi Anggoro Hadi menjelaskan, hingga akhir 2019 jumlah warga miskin di desa Panggung Harjo sebanyak sekitar 1.430 KK. Keberadaan BUMDes Panggung Lestari diakui oleh pemerintah desa cukup membantu mengatasi masalah kemiskinan. Dari 90 karyawan di BUMDes tersebut, 50 persen di antaranya merupakan warga Desa Panggung Harjo. Masih terkait upaya mengurangi angka kemiskinan melalui pendidikan, BUMDes Panggung Lestari memberikan beasiswa kuliah pada empat warga kurang mampu di Desa Panggung Harjo. Program anti kemiskinan lainnya yang juga dilakukan BUMDes Panggung Lestari yaitu membantu renovasi atau bedah rumah warga miskin.

Paran BUMDes Panggung Lestari dalam penanggulangi kemiskinan melalui jalur pendidikan juga bisa dilihat dari hasil riset yang dilakukan Daring Sudrajat (2020). Pada 23 Maret 2017 telah dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Desa Panggungharjo dan Politeknik Negeri ATK Yogyakarta tentang pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memberikan kesempatan bagi warga Desa Panggungharjo agar dapat kuliah di Politeknik Negeri ATK Yogyakarta, baik dengan fasilitasi beasiswa pendidikan penuh (biaya pendidikan

ditanggung bersama antara Pemerintah Desa dan Politeknik Negeri ATK Yogyakarta) maupun fasilitasi kuliah dengan subsidi sehingga mahasiswa hanya dibebani biaya 25% dari yang seharusnya. Program ini juga kerjasama dengan program CSR dari BUMDes Panggung Lestari.

Gambar 2.
MoU Pemerintah Desa Panggungharjo dengan ATK Yogyakarta



(Sumber: Dokumen BUMDes Panggung Lestari 2017)

Beasiswa juga diberikan BUMDes Panggung Lestari kepada karyawan yang ingin melanjutkan studinya, seperti salah satu manajer di KUPAS Ibu Peni Suryani yang sekarang melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Beasiswa tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk bantuan pembayaran SPP sampai dengan kelulusan.

Untuk periode Agustus 2019 diberikan kepada pelajar di SMKN 1 Bantul yang merupakan warga dusun Prancak. BUMDes bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam menentukan siswa miskin yang akan mendapatkan bantuan beasiswa.

Gambar 3.
Penyerahan Beasiswa untuk Pelajar SMK N 1 Sewon



(Sumber: Dokumentasi BUMDes Panggung Lestari 2019)

Program pendidikan telah memberikan harapan baru kepada anak-anak yang berasal dari warga masyarakat berpenghasilan rendah untuk paling tidak berani memimpikan satu masa depan yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini karena memang satu-satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan hanyalah pendidikan.

Kontribusi BUMDes bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. BUMDes Panggung Lestari dalam laporan hasil setiap tahunnya juga selalu memberikan 5% dari hasil usahanya dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial bekerjasama dengan Bapel JPS yakni badan pelaksana jaring pengaman sosial yang fokus kegiatannya pada pelayanan sosial bagi masyarakat yang rentan, yakni masyarakat miskin, lansia, dan masyarakat yang mengalami rentan ekonomi.

Gambar.4.
Sharing Profit BUMDes Panggung Lestari

Prosentasi Bagi Hasil BUMDes Panggung Lestari		
NO	PROSENTASE	KETERANGAN
1	45 %	Desa
2	30 %	Tambahan Modal
3	20 %	Bonus Karyawan
4	5 %	Kegiatan Sosial

(Sumber: Dokumen BUMDes Panggung Lestari 2014)

Sharing profit tersebut digunakan untuk bantuan pembangunan sekolah, pembangunan mushola, pengerasan jalan, membantu RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni, membantu anak yatim piatu dan lain-lain.

Pola dan dampak yang hampir sama juga dilakukan BUMDes Tridadi Makmur dalam upaya pengetantasan kemiskinan. Kontribusi BUMDes ini dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Tridadi dan sekitarnya dilakukan dengan cara merekrut karyawan dari desa setempat. Saat ini BUMDes Tridadi Makmur sudah menyerap sebanyak 135 orang tenaga kerja dengan rincian 56 orang karyawan di unit Puri Mataram ditambah 4 orang di Unit Budidaya dan Rental Tanaman, tenaga harian sejumlah 40 orang, kelompok Pasar Ndelik 15 orang, dan tenaga bantu 20 orang (Muflih Muhammad Mahir : 2020). Masih merujuk hasil penelitian tersebut, karyawan yang dipekerjakan di BUMDes Tridadi Makmur mendapatkan gaji sesuai UMR Sleman.

Penutup

Kesimpulan

Faktor penyebab kemiskinan memang sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Secara garis besar, faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan ialah pendidikan, pendapatan, lokasi serta keterbatasan akses baik itu akses ke kesehatan, keuangan maupun pelayanan publik lainnya.

Sementara itu, keberadaan BUMDes sebagai penggerak ekonomi pedesaan, berperan dalam mengurangi angka kemiskinan. Ada beberapa pola yang dilakukan BUMDes dalam mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini mengkomparasikan dua BUMDes, yakni Panggung Lestari, Sewon, Bantul dan Tridadi Makmur, Sleman, dalam peran mereka mengurangi angka kemiskinan. Pola yang dilakukan kedua BUMDes itu adalah pertama dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, kedua menggandeng warga kurang mampu sebagai mitra, ketiga dengan memberikan beasiswa pendidikan, dan keempat dengan melakukan bedah rumah tidak layak huni.

Saran

Selain memperkuat penyediaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran dan juga memberikan beasiswa pendidikan, BUMDes juga didorong untuk membantu warga desa yang tidak mampu dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kemiskinan tak hanya faktor pekerjaan dan pendidikan, tetapi juga soal akses pelayanan kesehatan dan juga pelayanan publik lainnya.

Daftar Pustaka

- Chadwik, Bruce A. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*: Semarang: IKIP Semarang Press.
- Chambers, Robert, 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Dating, Sudrajat. tt. “Peran Bumdes Panggung Lestari dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.”
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1992. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muflih Muhammad Mahiry, *Manajemen BUMDes Tridadi Makmur Desa Tridadi*.
- Nurwati, Nunung. 2008. “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan”. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 1, Januari.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto dan Suwondo. 2012. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Suyanto, Bagong, 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penangannya*. Malang: In-Trans Publishing.
- Suyanto, Bagong, 1996. *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.